

Katalog BPS : 1413.7371

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA MAKASSAR 2014

## PUSKESMAS KASSI - KASSI



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR

<https://makassar.kota.bps.go.id>

# Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar

**2014**

Katalog BPS : 1413.7371

Naskah/Editor : Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Gambaran Kulit : Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

# **Indeks Pembangunan Manusia**

**Kota Makassar**

**2014**

Badan Pusat Statistik Kota Makassar

<https://makassarkota.bps.go.id>  
<http://makassarkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan-Nya sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2014 dapat terbit.

Terbitnya publikasi ini berkat kerja sama semua pihak baik dalam lingkup BPS maupun data dari berbagai instansi terkait. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini sehingga publikasi ini dapat selesai dengan baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi seluruh pengguna data khususnya pemerintah untuk melihat sejauh mana kemajuan suatu daerah dengan melihat pembangunan manusianya, juga untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih luas.

Makassar, 31 Oktober 2015  
Badan Pusat Statistik Kota Makassar  
Kepala,

H. ABD. HARIS, SE.  
NIP. 196612311993011001

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I . PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	3
1.3. Sistematika Pembahasan .....	3
<b>BAB II. METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Konsep dan Defenisi Indeks Pembangunan Manusia .....	6
2.1.1. Angka Harapan Hidup .....	8
2.1.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .....	9
2.1.3. Purchasing Power Parity .....	10
2.2. Sumber Data .....	11
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	12
3.1. Letak Geografis .....	12
3.2. Kependudukan .....	12
3.3. Ekonomi ( PDRB ) .....	13
<b>BAB IV POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA</b> .....	14
4.1. Komponen-Komponen IPM .....	14

---

4.1.1. Indeks Kesehatan .....	15
4.1.2. Indeks Pendidikan .....	15
4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli .....	16
4.2. Indeks Pembangunan Manusia .....	16
<b>BAB V KESEHATAN</b> .....	<b>19</b>
5.1. Angka Harapan Hidup .....	19
5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	20
5.3. Status Kesehatan Masyarakat .....	21
<b>BAB VI PENDIDIKAN</b> .....	<b>23</b>
6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	23
6.2. Tingkat Pendidikan .....	25
6.2.1. Harapan Lama Sekolah .....	25
6.2.2. Rata-rata lama sekolah .....	26
6.2.3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan .....	27
6.3. Tingkat Partisipasi Sokolah .....	28
<b>LAMPIRAN TABEL</b> .....	<b>29</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memajukan suatu wilayah pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh perlu dilakukan, sehingga hasil dari pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup, karena dimensi manusia dalam pembangunan merupakan tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Kejadian ini muncul sebagai akibat dari tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada pembangunan manusia dan hak-hak azasinya.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup karena pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Dengan berjalannya waktu, paradigma pemikiran pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul lagi paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) dan memasuki

tahun 90-an paradigma pembangunan lebih terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Berubahnya kebijaksanaan dalam pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat, sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep "*basic need development*". Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah.

Oleh karena itu, untuk mengukur seberapa besar keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di Kota Makassar, maka dalam publikasi ini akan disajikan angka-angka dari setiap komponen yang membentuk angka IPM Kota Makassar.

### **1.2. Tujuan Penulisan.**

Penyusunan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2014 ini, sebagai kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Publikasi ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi tentang indikator pengukuran pencapaian keberhasilan pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Disamping itu, angka IPM berfungsi sebagai input dalam penyusunan pola dasar dan rencana pembangunan daerah, sehingga prioritas perencanaan pembangunan lebih terarah. .

Terbitnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kota Makassar tahun 2014.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Penulisan publikasi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian bab dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Kota Makassar yang diuraikan atas letak

geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB). Kemudian bab empat membahas mengenai posisi pembangunan manusia yang meliputi; Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bab lima membahas masalah kesehatan yang meliputi; angka harapan hidup, pelayanan kesehatan, dan status kesehatan masyarakat. Bab enam membahas mengenai pendidikan yang meliputi; sarana dan prasarana pendidikan, tingkat pendidikan yang ditamatkan serta partisipasi sekolah.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

### 2.1. Konsep dan Definisi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks harapan hidup ( $e_0$ ), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks paritas daya beli/ standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{x(1)x(2)x(3)} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :  
X(1): Indeks harapan hidup  
X(2): Indeks pendidikan =  $1/2$  (indeks harapan lama sekolah) +  $1/2$  (indeks rata-rata lama sekolah).  
X(3): Indeks paritas daya beli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana  $X(i)$  : Indikator ke-i (i=1,2,3)  
 $X(i)_{\text{maks}}$  : Nilai maksimum  $X(i)$   
 $X(i)_{\text{min}}$  : Nilai minimum  $X(i)$

**Tabel 2.1**  
**Nilai Minimum – Maksimum Komponen IPM Metode Baru**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	83,4	83,4
<i>Expected Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	13,1	15
Pengeluaran per Kapita D disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (IDR)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (IDR)

**Keterangan:**

*Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2014*

- \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan *usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e0)*, komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu *harapan lama sekolah (expected years of schooling/EYS)* dan *rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/ MYS)* dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *purchising power parity/ daya beli*. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.

#### **2.1.1. Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )**

Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

### 2.1.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah/Expected Years of Schooling (EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Formulanya sbb.:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana :

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$

$E_i^t$  = Jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

$P_i^t$  = Jumlah penduduk usia  $i$  pada tahun  $t$

$i$  = Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ )

### 2.1.2.2 Rata2 Lama Sekolah/Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan

turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Dimana :

**RLS:** Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

**Lama sekolah penduduk<sub>i</sub>:** lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

**n:** jumlah penduduk ( i = 1, 2, 3, ..., n)

**Tabel 2.2.**  
**Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2/S3	18

### 2.1.3. Purchasing Power Parity (PPP)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana :  $p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$

$m$  : jumlah komoditas

### 2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional. Selain data survei tersebut sebagai pembandingan juga disajikan data Sensus Penduduk. Yang diungkap dalam penyajian laporan ini sebagai indikator atau data basis adalah data yang dihasilkan dari kor Susenas 2010 atau 2014 terutama indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan dan pendidikan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1. Letak Geografis**

Kota Makassar terletak di bagian Selatan Sulawesi Selatan dengan posisi 119° 24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan. sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Makassar adalah sekitar 175,77 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan dengan 143 desa/kelurahan, 970 RW dan 4.789 RT.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritin Paotere, pada tahun 2014 secara rata-rata kelembaban udara rata-rata 82,7 persen, suhu udara sekitar 26,5°C - 28,5°C dan rata-rata kecepatan angin 4,0 knot.

#### **3.2. Kependudukan**

Penduduk Kota Makassar berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 sekitar 1.408.072 jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 711.986 perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi 1.429.242 jiwa pada tahun 2014 dengan komposisi 706.814 laki-laki dan 722.428 perempuan. Sex ratio Kota Makassar pada tahun 2013 sekitar 97,77 yang berarti terdapat 97 lebih orang laki-laki diantara 100 perempuan, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 97,84 hal ini juga berarti terdapat 97 lebih orang laki-laki diantara 100 perempuan.

### **3.3. Ekonomi ( PDRB )**

Potret potensi ekonomi secara keseluruhan sebenarnya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan perkapita. Akan tetapi pendapatan perkapita masih merupakan ukuran secara umum/kasar dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu belum sepenuhnya dapat mengukur taraf kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 58,556,467.4 (jutaan rupiah) meningkat menjadi 100,026,504.9 (jutaan rupiah) pada tahun 2014 atau tumbuh dengan rata-rata 9,15 persen pertahun selama periode tersebut. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2014 adalah sektor industri yaitu sekitar 20,57 persen, yang sebelumnya yaitu tahun 2010 andilnya sekitar 21,46 persen terhadap PDRB.

Seperti kita ketahui bahwa PDRB setelah dikurangi faktor produksi dan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun menghasilkan PDRB perkapita. PDRB perkapita Kota Makassar berdasarkan harga berlaku tahun 2010 sebesar 43,61 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 69,99 juta rupiah pada tahun 2014.

## **B A B IV POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA**

Pembangunan diberbagai bidang kehidupan terus dilakukan sebagai wujud dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah seberapa besar manfaat yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan keberhasilan suatu pembangunan di daerah perlu dilakukan suatu pengukuran keinerja. Kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Untuk menentukan besarnya IPM suatu daerah, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli.

#### **4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

##### **4.1.1. Indeks Kesehatan**

Indeks kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup (eo) yang diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Angka harapan hidup Kota Makassar dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan kemajuan pembangunan dibidang kesehatan terus mengalami perbaikan. Meningkatnya Angka Harapan Hidup akan berimplikasi pula pada peningkatan indeks kesehatan. Pada tahun 2010-2011 indeks kesehatan Kota Makassar tercatat sekitar 79,04. Kemudian naik sedikit untuk tiga tahun terakhir tahun 2012-2014 menjadi 79,05.

##### **4.1.2. Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)**

Indeks Harapan Lama Sekolah merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Harapan Lama Sekolah di Kota Makassar mengalami peningkatan, yaitu 76,19 pada tahun 2010 dan tahun 2014 meningkat menjadi 81,92. Peningkatan Indeks Harapan Lama Sekolah disebabkan oleh komponen Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 13,71 persen pada tahun 2010 menjadi 14,75 persen pada tahun 2014. Sementara itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami

peningkatan dari 10,23 tahun pada tahun 2010 menjadi 10,64 tahun pada tahun 2014.

#### **4.1.3 Indeks Paritas Daya Beli**

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Makassar dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 sekitar Rp 14.907 meningkat menjadi sekitar Rp 15.079 pada tahun 2010.

#### **4.2. Indeks Pembangunan Manusia**

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia *secara keseluruhan* dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang

dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar pada tahun 2010 sekitar 77,63 kemudian mengalami peningkatan menjadi 77,82 pada tahun 2011 kemudian 78,47 di tahun 2012 serta untuk tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing menjadi 78,98 dan 79,35.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 60 ( $IPM < 60$ ) digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM 60 - kurang dari 70, ( $60 \leq IPM < 70$ ) digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM 70 – kurang dari 80 ( $70 \leq IPM < 80$ ) digolongkan tinggi dan nilai IPM diatas 80 ( $IPM \geq 80$ ) digolongkan sebagai IPM sangat tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kota Makassar tergolong IPM tinggi dan kelihatannya tinggal beberapa langkah lagi akan beralih dan memasuki golongan IPM sangat tinggi.

Kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, pada tahun 2014 IPM Kota Makassar menempati peringkat pertama yang tertinggi dengan nilai 79,35, kemudian peringkat kedua adalah Kota Pare-Pare dengan nilai IPM 75,66, peringkat ketiga Kota Palopo dengan nilai IPM 75,65, peringkat keempat Kabupaten Luwu Timur dengan nilai IPM 69,75. Dari 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kabupaten yang menempati peringkat terendah IPM-nya adalah

Kabupaten Jeneponto dengan nilai IPM 61,45. Untuk melihat besaran IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan peringkatnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

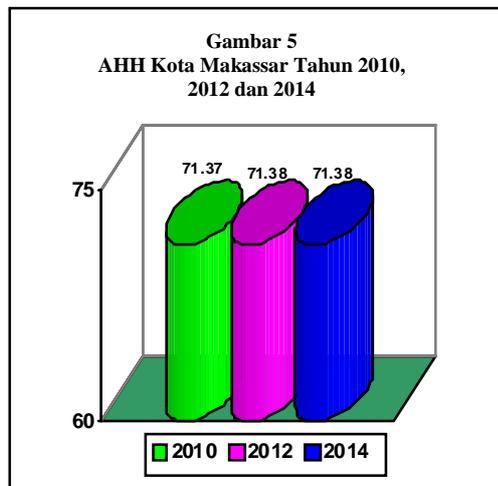
## **BAB V**

### **KESEHATAN**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti membangun tempat pelayanan kesehatan sampai tingkat pedesaan, penambahan jumlah tenaga kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, penyediaan obat generik yang lebih murah, dan sebagainya. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang baik dengan mudah, murah dan merata. Bahkan pemerintah berupaya dengan menyediakan fasilitas pengobatan secara gratis bagi kalangan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dengan menerbitkan kartu Jamkesmas sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam pengobatan bagi penduduk miskin. Disamping itu kegiatan penyuluhan kesehatan agar keluarga membiasakan diri untuk hidup sehat terus dilakukan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

#### **5.1 Angka Harapan Hidup**

Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam beberapa tahun terakhir ini, Angka Harapan Hidup Kota Makassar tahun 2010-2011 sebesar 71,37 dan seikit meningkat di tahun 2012-2014 sebesar 71,38.



Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen dapat banyak factor diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel

lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

## **5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan**

Keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan keterampilan tenaga kesehatan yang memahami tugas dan tanggungjawabnya tentunya akan kurang bermakna, begitu pula sebaliknya tenaga kesehatan yang tersedia dengan keterampilan yang cukup namun tanpa

dibarengi dengan fasilitas yang memadai tentu akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan jumlah fasilitas dan penambahan tenaga kesehatan.

Pada tahun 2014 Jumlah rumah sakit umum di Kota Makassar baik rumah sakit pemerintah maupun swasta sebanyak 20, rumah sakit jiwa sebanyak 1, rumah sakit bersalin sebanyak 15, rumah sakit khusus sebanyak 1, puskesmas sebanyak 39, puskesmas pembantu sebanyak 43, puskesmas keliling sebanyak 40, dan dokter praktek sebanyak 138.

#### **5.4. Status Kesehatan Masyarakat**

Data susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kota Makassar sekitar 29,53 persen pada tahun 2010, kemudian naik menjadi 29,53 persen dari total penduduk pada tahun 2012 Begitupula tahun 2014 menjadi 29,74 persen. Banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya perubahan cuaca, asupan gizi dan sebagainya. Kalau dilihat dari jenis kelamin, persentase laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 27,32 persen dan perempuan sekitar 31,57 persen pada tahun 2010, sementara tahun 2012 laki-laki sebanyak 27,32 persen dan perempuan sebanyak 31,57 persen. Begitu pula tahun

2014 laki-laki sebanyak 28,32 persen dan perempuan sebanyak 31,13 persen.

**Tabel 5.1.**  
**Persentase Penduduk Yang Mengeluh Sakit Menurut Jenis Kelamin**  
**Di Kota Makassar Tahun 2010 dan 2014**

Jenis Kelamin	2010		2014	
	Yang Mengeluh (%)	Penduduk	Yang Mengeluh (%)	Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	27,32	176.391	28,32	191.654
Perempuan	31,57	214.043	31,13	215.688
<b>Lk-lk+Perp</b>	<b>29,53</b>	<b>390.434</b>	<b>29,74</b>	<b>407.342</b>

*Sumber: Susenas 2010 dan 2014*

## **BAB VI PENDIDIKAN**

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan tergambar dari semakin meningkatnya persentase alokasi dana APBN untuk bidang pendidikan pada beberapa tahun terakhir ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, adanya pendidikan gratis untuk tingkat sekolah tertentu, penambahan jumlah tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan pengajar melalui sertifikasi.

### **6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan.**

Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas serta biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan tiga hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan

Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu harapan pemerintah kota Makassar agar masyarakatnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah murid dengan guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Di Kota Makassar pada tahun 2013 - 2014 rasio murid terhadap guru SD, SLTP dan SLTA memberikan indikasi adanya perbaikan. Pada tahun 2013 rasio murid terhadap guru SD sebanyak 22 murid setiap guru, ini berarti ada sekitar 30 murid yang harus ditangani oleh seorang guru SD pada sebuah sekolah tempat dia mengajar.

Untuk tingkat SLTP rasio murid terhadap guru pada tahun 2013 adalah 19 murid setiap guru dan tahun 2014 turun menjadi 18 murid setiap guru.

Sementara untuk tingkat SLTA rasio murid terhadap guru yaitu tahun 2013 rasio murid terhadap guru SLTA adalah 9 murid, dan tahun 2014 naik menjadi 12 murid. Hal ini terjadi karena adanya penambahan murid SLTA baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

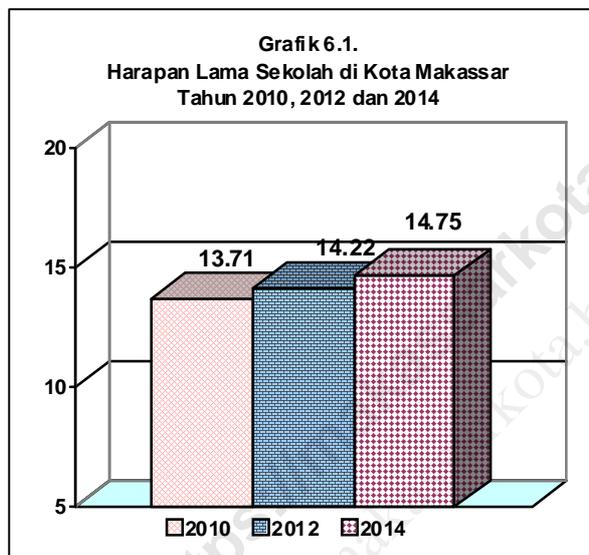
Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu daerah atau belum.

Rasio murid-sekolah SD di Kota Makassar pada tahun 2013 sekitar 317 murid per sekolah, kemudian turun menjadi 258 murid

persekolah pada tahun 2014. Demikian juga rasio siswa SLTP mengalami penurunan dari 325 siswa per sekolah pada tahun 2013 turun menjadi 178 siswa pada tahun 2014. Sementara itu, rasio siswa SLTA juga terjadi penurunan dari 246 pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 131 siswa pada tahun 2014.

## 6.2. Tingkat Pendidikan

### 6.2.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)



Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Makassar tahun 2010 13,71 tahun kemudian pada tahun 2011 naik menjadi sekitar 13,83 tahun. Selanjutnya tahun 2012 sebesar 14,22 tahun, naik menjadi 14,48 tahun di tahun 2013 dan 14,75 tahun di tahun 2014.

Untuk data HLS Kota Makassar adalah peringkat kedua di Sulawesi Selatan dan tertinggi di Kota Palopo sebesar 15,01 persen.

### 6.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 sekitar 10,50 tahun kemudian tahun 2012 naik menjadi 10,82, sementara tahun 2014 meningkat lagi menjadi 10,86 tahun. Dengan melihat angka tersebut maka dapat

Tabel. 6.1.  
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Pendidikan yang ditamatkan (%)	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Tidak punya ijazah	13,26	11,80
SD	18,87	20,71
SLTP	17,63	16,56
SMU	30,52	28,65
SMA Kejuruan	3,17	3,37
D I/II	0,29	0,46
D III	2,76	2,06
D IV/S1/S2/S3	13,50	14,96

Sumber : Susenas 2013 dan 2014

dikatakan bahwa pada tahun 2014 tingkat pendidikan penduduk rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan bahkan setingkat dengan kelas 2 SLTA kemudian pada tahun 2010 dan 2014. Dengan melihat perkembangan tersebut diharapkan dalam beberapa tahun yang akan datang rata-rata lama sekolah telah mencapai 12 tahun atau setara dengan tamat SLTA. Angka rata-rata lama sekolah Kota Makassar merupakan yang

tertinggi di Sulawesi Selatan diatas Kota Palopo 9,96 tahun dan Kota Pare-pare 9.95 tahun.

### **6.2.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu daerah antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduknya. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2013 dan tahun 2014 penduduk Kota Makassar umur 10 tahun ke atas yang mempunyai ijazah tertinggi yang dimiliki mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2013 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah sekitar 13,26 persen, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi 11,80 persen. Sementara itu penduduk yang mempunyai ijazah SD pada tahun 2013 sekitar 18,87 persen kemudian naik menjadi 20,71 persen tahun 2014. Untuk tingkat SMU, pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 30,52 persen dan sedikit turun menjadi 28,65 persen pada tahun 2014. Untuk tingkat SMA kejuruan, pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 3,17 persen dan naik menjadi 3,37 persen pada tahun 2014. Kemudian untuk DI/II, pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 0,29 persen dan naik menjadi 0,46 persen pada tahun 2014. Demikian juga untuk DIII, pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 2,76 persen dan naik menjadi 2,06 persen pada tahun 2014. dan untuk DIV,S1,S2 dan S3, pada tahun 2013 penduduk yang mempunyai ijazah sekitar 13,50 persen dan naik menjadi 14,96 persen pada tahun 2014. Jika dilihat secara umum jenjang

pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Makassar mengalami kenaikan dimana tahun 2013 jumlah penduduk yang mempunyai ijazah SD ke atas adalah sekitar 86,74 persen menjadi 86,77 persen tahun 2014.

#### **6.2.4 Tingkat Partisipasi Sekolah**

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat dilihat dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). APS disini adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut.

Tabel 6.2  
Angka Partisipasi Sekolah  
Menurut Usia Sekolah (7-18 Tahun),  
Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

<b>Penduduk Usia Sekolah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)
7 – 12	96,98	98,57
13 – 15	95,13	96,78
16 – 18	69,63	71,08

*Sumber : Susenas 2013 dan 2014*

Pada periode 2010-2014 APS untuk usia sekolah dasar di Kota Makassar mengalami penurunan, sementara untuk usia SLTP dan SLTA mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 APS SD (7-12 tahun) sekitar 96,98 turun menjadi sekitar 98,57 persen pada tahun 2014. Kemudian APS Sekolah

Lanjutan Pertama meningkat dari 95,13 persen tahun 2013 menjadi 96,78 persen tahun 2014. Selajutnya APS untuk usia Sekolah Lanjutan Atas

dimana tahun 2013 sekitar 69,63 persen menjadi 71,08 persen tahun 2014. Secara keseluruhan APS untuk kelompok usia sekolah SD, SMP dan SMA menunjukkan kenaikan angka partisipasi sekolah dari tahun 2013 ke tahun 2014.

<https://makassarkota.bps.go.id>  
<http://makassarkota.bps.go.id>

**Indikator Kependudukan Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014**

No.	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Penduduk</b> - Laki-laki - Perempuan	696.086 711.986	706.814 722.428
2.	<b>Sex Ratio</b>	97,77	97,84
3.	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b> - 1990 – 2000 - 2000 – 2010 - 2010 – 2014		1,32 1,87 0,02
4.	<b>Kepadatan Penduduk (pddk/km<sup>2</sup>)</b>	8.011	8.131
5.	<b>Penduduk menurut kelompok umur</b> - 0 – 14 - 15 – 64 - 65 +	409.220 950.737 48.115	376.314 1.002.540 50.388
6.	<b>Angka Beban Ketergantungan</b>	48,10	42,57
7.	<b>Jumlah Rumahtangga</b>	320.656	337.739
8.	<b>Rata-rata Anggota Rumahtangga</b>	4	4

Sumber : BPS Kota Makassar

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM  
Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014**

No.	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Harapan Hidup (e0)	71,38	71,38
2.	Harapan Lama Sekolah	14,48	14,75
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,61	10,64
4.	Paritas Daya Beli (PPP) (000.Rp)	14.947	15.079
5.	Indeks kesehatan	79,05	79,05
6.	Indeks Pendidikan	75,60	76,43
7.	Indeks PPP	82,42	82,69
8.	IPM	78,98	79,35

Sumber : BPS Kota Makassar

**Beberapa Indikator Kesehatan Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Rumah Sakit Umum	17	17
2.	Rumah Sakit jiwa	1	1
3.	Rumah Sakit Bersalin	22	22
4.	Rumah Sakit Khusus lainnya	2	2
5.	Puskesmas	46	46
6.	Puskesmas Pembantu	38	38
7.	Puskesmas Keliling	40	37
8.	Dokter Praktek	1.418	1.418

Sumber : BPS Kota Makassar

**Beberapa Indikator Pendidikan Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014**

No.	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Jumlah Sekolah :</b>		
	- SD	462	547
	- SLTP	188	246
	- SLTA	204	237
2.	<b>Jumlah Murid:</b>		
	- SD	146.296	141.183
	- SLTP	61.107	43.772
	- SLTA	50.253	31.024
3.	<b>Jumlah Guru :</b>		
	- SD	6.671	4.620
	- SLTP	3.984	2.460
	- SLTA	5.829	2.533
4.	<b>Rasio Murid-Guru :</b>		
	- SD	22	30
	- SLTP	19	18
	- SLTA	9	12
5.	<b>Rasio Murid Sekolah :</b>		
	- SD	317	258
	- SLTP	325	178
	- SLTA	246	131

Sumber :2013: Dinas Pendidikan Kota Makassar

2014: Dinas Pendidikan Prop. SulSel

**Beberapa Indikator Pendidikan Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014**

No.	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Harapan Lama Sekolah (tahun)</b>	14,48	14,75
2.	<b>Pendidikan yang Ditamatkan (%)</b>		
	- Tdk punya ijazah	13,26	7,78
	- SD	18,87	18,25
	- SLTP	17,63	18,37
	- SMU	30,52	35,95
	- Diploma,Akademi,Sarjana	16,55	19,64
3.	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)</b> :		
	- 7 – 12	96,98	98,57
	- 13 – 15	95,13	96,78
	- 16 – 18	69,63	71,08

Sumber : BPS Kota Makassar

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota  
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2014**

No.	Kab/Kota	IPM		Peringkat IPM	
		2013	2014	2013	2014
1	Selayar	63,16	63,66	21	21
2.	Bulukumba	64,27	65,24	19	17
3.	Bantaeng	64,88	65,77	16	16
4.	Jeneponto	60,55	61,45	24	24
5.	Takalar	62,58	63,53	22	22
6.	Gowa	65,45	66,12	14	15
7.	Sinjai	63,47	63,83	20	20
8.	Maros	66,06	66,65	11	11
9.	Pangkajene Kepulauan	65,24	66,16	15	13
10.	Barru	67,02	67,94	8	8
11.	Bone	61,40	62,09	23	23
12.	Soppeng	64,43	64,74	18	19
13.	Wajo	65,79	66,49	12	12
14.	Sidenreng Rappang	67,15	68,14	7	7
15.	Pinrang	68,14	68,92	6	6
16.	Enrekang	68,39	69,37	5	5
17.	Luwu	66,39	67,34	10	9
18.	Tana Toraja	64,55	65,08	17	18
19.	Luwu Utara	66,40	66,90	9	10
20.	Luwu Timur	69,53	69,75	4	4
21.	Toraja Utara	65,65	66,15	13	14
22.	Kota Makassar	78,98	79,35	1	1
23.	Kota Pare-Pare	75,10	75,66	2	2
24.	Kota Palopo	75,02	75,65	3	3
	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>67,92</b>	<b>68,49</b>	<b>15</b>	<b>15</b>